

# **RENCANA STRATEGIS BPS PROVINSI PAPUA 2015-2019**

**No. Publikasi** : 02110.1206  
**Katalog BPS** : 1201010  
**Ukuran Buku** : 17 cm x 24 cm  
**Jumlah Halaman** : 44 halaman

**Naskah:**

Sub Bagian Bina Program  
BPS Provinsi Papua

**Gambar Kulit:**

BPS Provinsi Papua

**Diterbitkan oleh:**

BPS Provinsi Papua

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Papua periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Provinsi Papua untuk 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu Renstra BPS. Renstra BPS Provinsi Papua disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab BPS Provinsi Papua pada periode 2010-2014 dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS BPS Provinsi Papua.

Renstra BPS Provinsi Papua menjabarkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan teknis dan administrasi dalam mendukung kegiatan teknis dan administrasi BPS dalam kurun waktu 2015-2019. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan menjadi acuan masing-masing bidang/seksi di lingkup BPS Provinsi Papua dan diimplementasikan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPS Provinsi Papua.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang berperan serta dalam penyusunan dan penerbitan Renstra ini. Kritik dan saran untuk perbaikan Renstra ini sangat kami hargai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa merestui segala usaha dan upaya kita. Amin.

Jayapura, 8 Juli 2015

Kepala BPS Provinsi Papua,



**Ir. Didik Koesbianto, Msi**  
**NIP. 19650809 198702 1 001**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

BPS Provinsi Papua mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS Provinsi Papua.

Renstra BPS Provinsi Papua Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Papua sebagai pendukung kelancaran penyelenggara kegiatan teknis dan administrasi statistik dalam melaksanakan visi dan misi BPS khususnya serta pembangunan nasional di bidang statistik pada umumnya selama 2015-2019.

Visi BPS Provinsi Papua sebagaimana visi BPS adalah *“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”*. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi BPS tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik; dan (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015–

2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaanya; dan (3) kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam program-program: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS. Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS Provinsi Papua 2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Provinsi Papua untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.



## BAB I PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (*Medium-Term Expenditure Framework*), penganggaran terpadu (*Unified Budget*), dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budget*). Hal tersebut mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pendanaan, dengan kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi.

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan *good governance*.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), mensyaratkan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Provinsi Papua perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya *good governance* dan *clean goverment* di Indonesia.

Tugas yang dijalankan BPS Provinsi Papua selama lima tahun tertuang di dalam Renstra BPS Provinsi Papua Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Renstra BPS RI tahun 2015-2019. Renstra BPS Provinsi Papua Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS RI 2015-2019. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja

tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Provinsi Papua akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Renstra BPS Provinsi Papua Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Provinsi Papua dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dilakukan penjabaran secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

## **1.2. Kondisi Umum**

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum se penuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan BPS Provinsi Papua akan melaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan



Informasi Statistik yang ditetapkan oleh BPS RI untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan yang sejalan RPJM daerah, dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional.

BPS Provinsi Papua selama ini telah memenuhi kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Indikator sosial-ekonomi ini diperoleh melalui Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, dan berbagai survei di bidang sosial-ekonomi dan kependudukan. Beberapa indikator tersebut telah dihasilkan secara reguler maupun dalam kurun waktu tertentu.

Selama tahun 2010-2014, BPS melakukan beberapa sensus dan survei diantaranya Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011, Sensus Penduduk 2010, Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau 2011, Sensus Pertanian 2013, Susenas-Sakernas Tahunan dan lain-lain. Sensus dan survei ini secara langsung dan tidak langsung telah mendukung program-program pemerintah seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Secara khusus dan spesifik untuk Papua, data dan indikator ini juga membantu pemerintah daerah dalam mendapatkan deskripsi komprehensif mengenai keadaan sosial, ekonomi dan demografi dari penduduk Papua yang pada akhirnya sangat berperan dalam pengambilan kebijakan publik di Papua.

### **1.3. Potensi dan Permasalahan**

Dalam merencanakan pembangunan di bidang statistik yang akan dilaksanakan, dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan

permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

### **1.3.1. Potensi yang Dimiliki**

Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan

untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Provinsi Papua merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen.

Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, yang pada akhirnya menuntut ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil.

Secara umum kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen data dan informasi statistik di Provinsi Papua sudah sangat baik. Yang perlu diperbarui untuk mendukung hal ini adalah peningkatan hubungan yang bersinergi di lini *government to government (G to G)*, *government to people (G to P)* dan *people to people (P to P)*. *Government to government* yaitu hubungan antara pemerintah daerah dan BPS Provinsi Papua/BPS kabupaten/kota se-Papua; *government to people* yaitu hubungan BPS sebagai penyedia data dan masyarakat sebagai pengguna data; dan *people to people* yaitu antara KSK sebagai ujung tombak BPS di lapangan dengan responden di dalam proses pengumpulan data. Dukungan dari pemerintah pusat untuk hal ini tertuang pula di dalam RPJM Nasional Tahun

2015-2019 yang menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional.

### **1.3.2. Permasalahan yang Dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan masih berada pada permasalahan internal yaitu masih kurangnya SDM baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya. Reformasi birokrasi BPS yang telah diinisiasi pada tahun 2010 juga masih harus terus ditingkatkan penerapannya untuk semakin menumbuhkan semangat kerja yang penuh integritas dan amanah di dalam diri setiap pegawai BPS baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui. Dari segi teknis lapangan dalam rangka penyediaan data yang berkualitas, pemekaran wilayah membawa konsekuensi pada proses pengumpulan data dan layanan data. Selain itu, beberapa kabupaten/kota hasil pemekaran ada yang belum mempunyai kantor perwakilan BPS. Di BPS Papua sendiri, 8 dari 29 kabupaten/kota belum memiliki kantor perwakilan/kantor BPS kabupaten. Kesemuanya berada di wilayah yang terpencil, sangat minim pembangunan dan infrastruktur, beberapa diantaranya bahkan terisolasi dan tidak memiliki akses transportasi publik. Ditambah lagi dengan beberapa kabupaten induk yang walaupun sudah memiliki kantor, namun berada di *remote area* dengan

akses komunikasi (seperti internet dan telepon) dan transportasi yang sangat terbatas.

Hal-hal lain yang dipandang sebagai permasalahan eksternal adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan *response rate* yang rendah.

Selain itu, belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan.

Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih sering terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien.

## **BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS PROVINSI PAPUA**

---

### **2.1. Visi BPS Provinsi Papua**

Visi BPS Provinsi Papua adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”.

### **2.2. Misi BPS Provinsi Papua**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Provinsi Papua yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;
- b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan
- c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

### **2.3. Tujuan BPS Provinsi Papua**

Tujuan I: Peningkatan kualitas data statistik;

Tujuan II: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;

Tujuan III: Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS Provinsi Papua berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan

melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS RI dalam tempo 2015-2019, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

Guna memudahkan penilaian pencapaian kinerja, beberapa indikator dan target ditetapkan untuk setiap tujuan secara spesifik. Secara spesifik indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Tujuan, Indikator Kinerja dan Target BPS Provinsi Papua 2015-2019**

No.	Tujuan		Target				
	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	95%	95%	95%	95%	95%
2.	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase konsumen yang puas akan pelayanan data BPS	84%	84%	84%	84%	84%
3.	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	70	75	78	81	84

#### **2.4. Sasaran Strategis BPS Provinsi Papua**

Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Peningkatan kualitas data statistik” adalah:
  - 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran:
    - 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik;
    - 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;
    - 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS;
    - 1.1.4. Jumlah *Press Release* yang tepat waktu;
    - 1.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu; dan
    - 1.1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu.
  - 1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement), dengan indikator sasaran:
    - 1.2.1. Presentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan rumah tangga;
    - 1.2.2. Presentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha;
    - 1.2.3. Presentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan non rumah tangga no usaha.



2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, adalah:
  - 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*), dengan indikator sasaran:
    - 2.1.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website* BPS.
    - 2.1.2. konsumen yang puas terhadap akses data BPS;
    - 2.1.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS.
3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: “Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, adalah:
  - 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dengan indikator sasaran:
    - 3.1.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
    - 3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I
  - 3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, dengan indikator sasaran:
    - 3.2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat.

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

---

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Industri, Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa,

dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Papua**

Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Provinsi Papua mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

- a) Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;
- b) Peningkatan *response rate*;
- c) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat;
- d) Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS;
- e) Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
- f) Penguatan fungsi yang terkait dengan system manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja;
- g) Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja.

Sedangkan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas;
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik;
- c) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional;
- d) Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data;
- e) Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS;
- f) Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik;
- g) Meningkatkan *Customer Relationship Management*;
- h) Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik;
- i) Meningkatkan kualitas *website* BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai;
- j) Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik;
- k) Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
- l) Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayananan prima hasil kegiatan statistik;

- m) Mengoptimalkan pengembangan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif;
- n) Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
- o) Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru;
- p) Megoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran;
- q) Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Sedangkan untuk BPS Provinsi Papua mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik, Program Teknis adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Adapun Program Generik BPS Provinsi Papua meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS.

Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, sedangkan Program PSPA BPS bertujuan

Rencana Strategis *BPS Provinsi Papua* 2015-2019 24

untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi di daerah.

Secara lengkap setiap kegiatan beserta indikator kinerja, target pencapaian dan alokasi anggaran yang dibutuhkan disajikan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan penjabarannya sampai dengan kegiatan disajikan pada tabel 2.

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua	<p>1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;</p> <p>2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik;</p> <p>3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk</p>	<p>1. Peningkatan kualitas data statistik</p> <p>2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik</p> <p>3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel</p>	<p>1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran:</p> <p>1.1.1.Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik;</p> <p>1.1.2.Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;</p> <p>1.1.3.Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS;</p> <p>1.1.4.Jumlah Press Release yang tepat waktu;</p> <p>1.1.5.Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu; dan</p> <p>1.1.6.Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu.</p>	<p>a)Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;</p> <p>b)Peningkatan response rate;</p> <p>c)Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat;</p> <p>d)Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS;</p> <p>e)Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;</p>	<p>a) a)Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas;</p> <p>b)Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik;</p> <p>c)Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional;</p> <p>d)Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data;</p> <p>e)Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS;</p> <p>f) Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik;</p> <p>g)Meningkatkan Customer Relationship Management;</p>	<p>1. PPIS</p> <p>2. DMPTTL</p> <p>3. PSPA</p>	<p>1. KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)</p> <p>2. KEGIATAN 2886: BPS Provinsi (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)</p> <p>3. KEGIATAN 2891: BPS Provinsi</p>



	kemajuan perstatistikan.	<p>1.2.Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement), dengan indikator sasaran:</p> <p>1.2.1.Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga;</p> <p>1.2.2.Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha;</p> <p>1.2.3.Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga no usaha.</p> <p>2.1.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement), dengan indikator sasaran:</p> <p>2.1.1.Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS.</p> <p>2.1.2.Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS;</p>	<p>f)Penguatan fungsi yang terkait dengan system manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja;</p> <p>g)Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja.</p>	<p>h)Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik;</p> <p>i) Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai;</p> <p>j) Mengoptimalkan sistem informasi statistikdalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik;</p> <p>k)Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;</p> <p>l) Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayananan prima hasil kegiatan statistik;</p> <p>m)Mengoptimalkan pengembangan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif;</p>		(Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)
--	--------------------------	---	--	---	--	---

		<p>2.1.3.Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS.</p> <p>3.1.Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dengan indikator sasaran:  3.1.1.Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu;  3.1.2.Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I</p> <p>3.2.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, dengan indikator sasaran:  3.2.1.Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat</p>		<p>n)Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;</p> <p>o)Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru;</p> <p>p) Megoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpanan penggunaan anggaran;</p> <p>q)Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.</p>	
--	--	---	--	---	--

**Tabel 2. Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan BPS Provinsi Papua 2015-2019**

## **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

---

### **4.1. Target Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

#### **4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Papua untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 – 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Provinsi Papua dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Papua Priode 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3 Indikator Sasaran Strategis**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
<b>T.1.</b> Peningkatan kualitas data statistik	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	95 %
		IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	92 %
		IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100 %
		IKSS 1.4. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu	32
		IKSS 1.5. Jumlah release data statistik yang tepat waktu	28
		IKSS 1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	1
			SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data ( <i>Respondent Engagement</i> )

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
		IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha  IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha	95 %  90 %
<b>T.2.</b> Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>User Engagement</i> )	IKSS 3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS  IKSS 3.2. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS  IKSS 3.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
<b>T.3.</b> Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	IKSS 4.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu IKSS 4.2. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	
	SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	IKSS 5.1. Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	

#### 4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan keempat program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS Provinsi Papua dalam kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

**Tabel. 4 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
<b>1. KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)</b>	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	95 %
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data ( <i>Respondent Engagement</i> )	IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	92 %
		IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100 %
		IKSS 1.4. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu	32
		IKSS 1.5. Jumlah release data statistik yang tepat waktu	28
		IKSS 1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	1
		IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan rumah tangga	100 %



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
		IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha  IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha	95 %  90 %
<b>2. KEGIATAN 2886: BPS Provinsi (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)</b>	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>User Engagement</i> )	IKSS 3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>  IKSS 3.2. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS  IKSS 3.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
<b>3. KEGIATAN 2891: BPS Provinsi (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)</b>	SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS  SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	IKSS 4.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu IKSS 4.2. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu  IKSS 5.1. Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	

#### 4.2. Kerangka Pendanaan BPS Provinsi Papua

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS Provinsi Papua. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. Alokasi Anggaran 2015-2019 Menurut Program**

**(Juta Rupiah)**

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. ALOKASI PROGRAM Teknis</b>					
I. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	19113.735	17483.61	15431.59	7964.978	11600.91
- Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	19113.735	17483.61	15431.59	7964.978	11600.91
<b>B. ALOKASI PROGRAM GENERIK</b>					
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	9472.281	11848.38	11922.69	12043.77	11941.66
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	9472.281	11848.38	11922.69	12043.77	11941.66

Teknis Lainnya BPS Provinsi					
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS	19895.072	16934.73	17469.65	18865.9	17737.37
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi	19895.072	16934.73	17469.65	18865.9	17737.37
<b>Total</b>					

## BAB V PENUTUP

---

Renstra BPS Provinsi Papua periode 2015 – 2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan dalam Renstra BPS 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas.

Dalam Renstra BPS Provinsi Papua 2015 – 2019, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

# LAMPIRAN



**Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua**

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
BPS Provinsi Papua							48,481.09	46,266.72	44,823.93	38,874.65	41,279.94	
	SS.1. Meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS											1. Bagian Tata Usaha 2. Bidang Statistik Sosial 3. Bidang Statistik Distribusi 4. Bidang Statistik Produksi 5. Bidang Statistik Neraca 6. Bidang IPDS
	1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	95%	95%	95%	95%	95%						
	1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	82%	85%	86%	89%	92%						
	1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%						
	1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu	27	28	28	28	28						
	1.5. Jumlah Publikasi/Laporan	44	31	34	32	32						



PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	yang terbit tepat waktu											
	1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	10	2	2	1	1						
	<b>SS.2. Meningkatkan kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)</b>											
	2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	75%	80%	82%	84%	87%						
	2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	75%	80%	82%	84%	87%						
	2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non	75%	80%	82%	84%	87%						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	rumah tangga non usaha											
	<b>SS.3. Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)</b>											
	3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	4900	50000	50000	50000	50000						
	3.2. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	80%	82%	84%	86%	88%						
	3.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	80%	85%	85%	85%	85%						
	<b>SS.4. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS</b>											
	4.1. Persentase Pegawai yang	75%	75%	75%	75%	75%						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	menduduki jabatan fungsional tertentu											
	4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	90%	90%	90%	90%	90%						
	<b>SS.5. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</b>											
	5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	50	52	55	58	60						

<b>PROGRAM 06: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</b>						<b>19,113.74</b>	<b>17,483.61</b>	<b>15,431.59</b>	<b>7,964.98</b>	<b>11,600.91</b>	
<b>KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)</b>						<b>19,113.74</b>	<b>17,483.61</b>	<b>15,431.59</b>	<b>7,964.98</b>	<b>11,600.91</b>	
Jumlah Laporan Pengembangan											BPS Provinsi

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<b>Metodologi Sensus dan survei</b>											
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah dokumen updating peta	1067	1067	1067	1067	1067						
	<b>Jumlah Laporan Diseminasi Statistik</b>											
	Jumlah Laporan Diseminasi Statistik yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei kebutuhan data	80%	85%	85%	90%	95%						
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan</b>											
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan	2	2	2	2	2						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu											
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei ketenagakerjaan dan kependudukan dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%						
	<b>Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk</b>											
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk	0	1	1	1	1						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	yang terbit tepat waktu											
	<b>Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus</b>											
	Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu	1	0	0	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) Survei Penduduk Antar Sensus	100%	100%	100%	100%	100%						
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat</b>											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang	4	4	4	4	4						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	terbit tepat waktu											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN	4	4	4	4	4						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%						
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial</b>											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	3	1	3	3	3						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN	3	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan rumah tangga	95%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa	1	1	1	1	1						



PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa yang tepat waktu	0	0	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) Pendataan Potensi Desa	100%	100%	100%	100%	100%						
	<b>Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Persentase Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</b>											

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu	20	11	11	11	11						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN	2	0	0	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan rumah tangga	80%	80%	81%	82%	83%						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan usaha	70%	80%	81%	82%	83%						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	90%	81%	82%	83%	84%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan,											

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Perikanan, dan Kehutanan											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	1	0	0	0	0						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN	1	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan	80%	80%	81%	82%	83%						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	pendekatan rumah tangga											
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan usaha	70%	80%	81%	82%	83%						
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) Survei Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	90%	81%	82%	83%	84%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri,											

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<b>Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi</b>											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang terbit tepat waktu	4	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang memiliki ISSN/ISBN	4	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Industri, Pertambangan dan Penggalian,	90%	80%	81%	82%	83%						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Energi, dan Konstruksi dengan pendekatan usaha											
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi</b>											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	2	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN	2	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan usaha	70%	72%	75%	78%	80%						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	80%	85%	85%	90%	90%						
	<b>Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016</b>											
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu	0	1	1	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Sensus Ekonomi 2016	0	0	0	0	0						
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga</b>											



PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	4	3	3	3	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN	4	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan rumah tangga	80%	90%	90%	95%	95%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan usaha	80%	80%	82%	85%	87%						
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan</b>											

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<b>Survei Harga Biaya Hidup</b>											
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup yang terbit tepat waktu	0	1	1	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei biaya hidup	0	0	0	0	0						
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)</b>											
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) yang terbit tepat waktu	0	0	1	0	0						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)	0	0	0	0	0						
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata</b>											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	3	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN	3	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan	79%	85%	85%	90%	90%						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	dokumen (response rate) survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan usaha											
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	62%	65%	70%	75%	80%						
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi</b>											
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	6	2	2	2	2						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN	6	6	6	6	6						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca produksi dengan pendekatan usaha	80%	80%	85%	85%	90%						
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran</b>											
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	1	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang memiliki ISSN/ISBN	1	2	2	2	2						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga	75%	85%	85%	90%	90%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan usaha	75%	85%	87%	90%	92%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	75%	85%	87%	90%	92%						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik	2	3	3	3	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik yang tebit tepat waktu	2	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang memiliki ISSN/ISBN	2	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan rumah tangga	90%	90%	90%	90%	90%						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan usaha	80%	82%	85%	88%	90%						
<b>PROGRAM 01: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS</b>												
							9,472.28	11,848.38	11,922.69	12,043.77	11,941.66	
<b>KEGIATAN 2886: (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)</b>												
	<b>Layanan Perkantoran</b>											
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen	3	3	3	3	3						BPS Provinsi
	Persentase pembayaran upah	100%	100%	100%	100%	100%						



PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	dan gaji yang tepat waktu											
	Persentase Sarana dan Prasarana TIK dalam kondisi Baik	70%	86%	87%	88%	90%						
	Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi Baik	70%	86%	87%	88%	90%						
<b>PROGRAM 02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							<b>19,895.07</b>	<b>16,934.73</b>	<b>17,469.65</b>	<b>18,865.90</b>	<b>17,737.37</b>	
<b>KEGIATAN 2891: Biro Umum (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)</b>							<b>19,895.07</b>	<b>16,934.73</b>	<b>17,469.65</b>	<b>18,865.90</b>	<b>17,737.37</b>	
	<b>Jumlah Pengadaan kendaraan Bermotor</b>											<b>BPS Provinsi</b>
	Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<b>Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi</b>	8	8	200	200	200						
	Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
	<b>Jumlah Pengadaan kebutuhan peralatan dan fasilitas</b>	42	41	28	5	0						
	Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan	100%	100v	100%	100%	100%						
	<b>Jumlah pengadaan kebutuhan gedung dan bangunan yang memadai</b>	2	1	1	1	1						
	Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%						

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	gedung/bangunan yang diselesaikan											
	<b>Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>						
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	82%	85%	86%	89%	92%						
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						

## Lampiran 2. Pendanaan per Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PROGRAM TEKNIS (PPIS) BPS Provinsi Papua</b>					
1	KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)	19,113,735,000	17,483,606,186	15,431,591,281	7,964,977,593	11,600,914,377
<b>B.</b>	<b>PROGRAM GENERIK (DMPTTL dan PSPA) BPS Provinsi Papua</b>					
<b>I.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya</b>					
1	KEGIATAN 2886: (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)	9,472,281,000	11,848,379,811	11,922,691,198	12,043,774,784	11,941,657,702
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS</b>					
1	KEGIATAN 2891: (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)	19,895,072,000	16,934,725,650	17,469,647,364	18,865,901,156	17,737,365,643